



Cara Kerja Paradiplomasi: Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya meningkatkan investasi

How the Paradiplomacy works: Kendal Regency administration attempts to increase investment

1st Reyva Alviona Fernanda Priskilla^{*a}, 2nd Budi Setiyono^a, 3rd Muhammad Adnan^a

^aMagister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia

Correspondence: alvionareyva@gmail.com

Abstract

The Indonesia National Medium Term Development Plan Phase IV states that macroeconomic targets are strategies for increasing economic growth. One promoted strategy is sustainable investment, with a target of 7.3-8.0%. The government implemented a policy to open up investment as widely as possible to achieve this target through foreign and domestic investments. The policy of increasing investment, which is the focus of the central government, is supported by the regions, including Central Java. This support is proven by the issuance of Central Java Province Regional Regulation Number 12 of 2022 concerning implementing Capital Investment. One area that has high investment potential in Central Java is Kendal Regency. It cannot be denied that the existence of KEK has a high potential for developing business and attracting investors. In the era of globalization, local governments can attract foreign investors to the region through para-diplomacy strategies. This research uses descriptive qualitative research to analyze para-diplomacy strategies in increasing regional investment through Government to Business in Kendal Regency. The benefit of this research is that it contributes to the development of political science in regional investment policy through para-diplomacy strategies.

Keywords: *Investment; Paradiplomasi; Kendal Regency*

Abstrak

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia tahap IV menyebutkan adanya sasaran target ekonomi makro yang menjadi strategi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu strategi yang digalakkan yaitu investasi yang berkelanjutan dengan target 7,3-8,0%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan untuk membuka investasi seluas-luasnya melalui Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Kebijakan peningkatan investasi yang menjadi fokus pemerintah pusat, didukung oleh daerah termasuk di Jawa Tengah. Bentuk dukungan ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Salah satu daerah yang memiliki potensi tinggi investasi di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Kendal. Tidak dapat dipungkiri karena keberadaan KEK memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan bisnis dan menarik investor. Di era globalisasi, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk dapat menarik investor asing ke daerah melalui strategi paradiplomasi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis strategi paradiplomasi dalam peningkatan investasi daerah melalui *Government to Business* di Kabupaten Kendal. Adapun manfaat penelitian ini yaitu memberikan kontribusi perkembangan ilmu politik dalam kebijakan investasi daerah melalui strategi paradiplomasi.

Kata kunci: *Investasi; Paradiplomasi; Kabupaten Kendal*

I. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi adalah prasyarat yang diperlukan dalam proses pembangunan nasional. Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia tahap IV terdapat agenda prioritas untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Dalam upaya untuk mencapainya terdapat kebijakan yang perlu untuk dikembangkan yaitu peningkatan inovasi dan kualitas investasi. Salah satu strategi yang digalakkan yaitu investasi yang berkelanjutan dengan target 7,3-8,0%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan untuk membuka investasi

seluas-luasnya melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bagi investor.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia pasca Reformasi tahun 1999, membuat daerah memiliki peran aktif untuk mengembangkan potensinya termasuk dalam bidang investasi. Desentralisasi menurut Bhenyamin Hoessein (dalam penelitian Hartana (2017)) mempunyai dua pengertian yaitu pembentukan daerah otonomi dan penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Selanjutnya desentralisasi dikenal juga sebagai otonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, daerah memposisikan dirinya sebagai penyelenggara pemerintahan yang dapat memberikan panduan dan kebijakan terkait investasi untuk mempermudah masuknya investor.

Kebijakan peningkatan investasi yang menjadi fokus pemerintah pusat, didukung oleh daerah, termasuk di Jawa Tengah. Bentuk dukungan ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Terbitnya peraturan ini bertujuan untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mewujudkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya tarik bagi investor.¹

Sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan tujuan investasi, Jawa Tengah telah memiliki beberapa pusat perkembangan industri yang dapat menarik investor dengan dibukanya Kawasan industri. Kawasan Industri (KI) ini terletak di Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. Berdasarkan data statistik realisasi investasi Jawa Tengah tahun 2022 yang dirilis oleh DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah terdapat realisasi investasi sebanyak Rp. 58,89 Triliun dalam usaha menengah dan besar. Jika ditambahkan dengan usaha mikro dan kecil sebesar Rp. 9,52 Triliun maka total realisasi investasi Jawa Tengah Tahun 2022 menjadi Rp 68,41 Triliun.

Tabel 1. Capaian nilai investasi PMA pada 2022

Daerah	Total Investasi
Kabupaten Jepara	Rp. 9,42 Triliun
Kota Semarang	Rp. 4,77 Triliun
Kabupaten Batang	Rp. 4,73 Triliun
Kabupaten Kendal	Rp. 4,60 Triliun
Kabupaten Semarang	Rp. 1.93 Triliun

Sumber: DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah (2022)

¹ <https://www.beritadaerah.co.id/2021/09/04/tujuh-kawasan-industri-di-jawa-tengah/>, 2021, diakses pada 27 Mei 2023

Tabel 2. Capaian investasi PMDN terbesar yaitu:

Daerah	Total Investasi
Kota Semarang	Rp. 5,09 Triliun
Kabupaten Demak	Rp. 2,49 Triliun
Kabupaten Sukoharjo	Rp. 1,67 Triliun
Kabupaten Boyolali	Rp. 1,51 Triliun
Kabupaten Semarang	Rp. 1,15 Triliun

Sumber: DPMPTS Provinsi Jawa Tengah (2022)

Salah satu daerah yang memiliki potensi tinggi investasi asing di Jawa Tengah adalah Kabupaten Kendal, karena adanya Kawasan Industri Kendal (KIK), Pelabuhan Kendal, Jaringan Jalan Tol, dekat dengan Pelabuhan Tanjung Mas dan Bandara Ahmad Yani Kota Semarang. Selain itu Kendal juga dilewati oleh jalur ganda kereta api. Dengan keuntungan dan potensi insfastruktur tersebut membuat Kabupaten Kendal memiliki peluang menarik investor baik asing maupun domestik untuk melakukan investasi dalam berbagai bidang.

Menurut data dari DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2016 Kabupaten Kendal telah mendapatkan 20 investor di Kawasan Industri Kendal (KIK). Kawasan tersebut memiliki keunggulan karena telah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai dengan PP No. 85 Tahun 2019. Secara geografis KEK memiliki keunggulan karena terletak di wilayah yang dapat dijangkau baik jalur darat, laut, maupun udara. Dalam jangka panjang KIK ditargetkan meraih investasi sebanyak 72 triliun dengan menyerap 20.000 tenaga kerja pada tahun 2025.²

Tidak dapat dipungkiri karena keberadaan KEK, Kabupaten Kendal merupakan daerah yang memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan bisnis dan menarik investor. Kepala Kanwil DJPb Jateng, Muhdi dalam kegiatan Kunjungan Kerja ke KEK Kendal, Upaya Analisis Peluang Investasi Daerah di Jateng menyampaikan bahwa KEK Kabupaten Kendal memiliki banyak kelebihan yang didapatkan sehubungan dengan status Kawasan Ekonomi Khusus jika dibandingkan Kawasan Industri lainnya. Kelebihan tersebut ada pada fasilitas dan kemudahan yang didapatkan, berupa fasilitas fiskal dan non fiskal, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pernyataan ini diperkuat dengan data dari BPS di Kabupaten Kendal terkait dengan jumlah masuknya investasi sebesar:

Tabel 3. Realisasi Investasi Kabupaten Kendal

Tahun	Total Investasi
2020	Rp 65.813,00 Juta
2021	Rp 222.588,30 Juta
2022	Rp 4.609.592,78 Juta

Source : <https://jateng.bps.go.id/indicator/13/172/1/realisasi-proyek-nilai-investasi-dan-tenaga-kerja-penanaman-modal-asing-pma.html> diakses pada 9 Juni 2023.

Dari data yang disajikan oleh BPS di Kabupaten Kendal pada tahun 2020-2022 dapat dilihat bahwa *trend* investasi mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan pula dengan capaian nilai investasi PMA di Kabupaten Kendal terlihat tinggi berdasarkan data yang disajikan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

² <https://kek.go.id/kawasan/KEK-Kendal>, diakses pada 29 Mei 2023

pada tahun 2022. Pendapat ini diperkuat oleh Bupati Kendal yaitu Dico M. Ganinduto, B.Sc menyampaikan bahwa investasi di Kawasan Industri Kendal sampai dengan periode Januari 2023 telah menembus angka USD 2,55 Milyar dan menyerap 25.000 tenaga kerja dalam kegiatan forum diskusi Kendal Investment Talk yang diselenggarakan pada 7 Februari 2023. Dalam penyampaian tersebut dihadiri pula oleh Duta Besar Belanda, Polandia, Armenia, Spanyol, Laos, Romania, Perwakilan Taiwan Economic and Trade Office (TETO) dengan tujuan untuk dapat menarik investor dari negara tersebut untuk melakukan investasi di Kawasan Industri Kabupaten Kendal.

Dalam Peraturan Bupati Kendal nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disampaikan bahwa untuk mendukung kemudahan berinvestasi salah satu strategi yang digunakan yaitu mempercepat proses perijinan. Strategi ini dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi RPJMD tahun 2016-2021 tepatnya di tahun 2020 ditemukan bahwa peta potensi investasi Kabupaten Kendal mendapatkan nilai sangat rendah. Hal ini terjadi karena program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana dinilai kurang sehingga indikator tersebut tidak tercapai. Pada tahun 2020 juga terjadi penurunan nilai investasi baik PMA maupun PMDN.

Untuk mencapai target dan tujuan investasi nasional, pemerintah daerah menggunakan kebijakan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, kewenangan dan kewajiban untuk dapat mengelola daerahnya. Adapun kebebasan ini bertujuan untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan Masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah daerah menerapkan kebijakan penanaman modal dengan mendatangkan investor asing melalui strategi paradiplomasi.

Menangkap kondisi yang ada, penelitian ini berfokus pada strategi paradiplomasi pemerintah daerah terhadap penarikan investor di Kabupaten Kendal melalui strategi paradiplomasi.

Tinjauan Pustaka

Terkait dengan pelaksanaan peningkatan investasi di daerah terdapat berbagai penelitian sebelumnya yang menjadi acuan untuk melaksanakan penelitian ini. Adapun penelitian pertama dilakukan oleh Hammerle dan kawan-kawan (2023) dengan judul *Solar for renters: Investigating investor perspectives of barriers and policies*. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu intervensi kebijakan yang berusaha untuk memperbaiki pengecualian properti sewaan untuk menghadapi keseimbangan yang rumit baik dalam persepsi untung maupun dampak yang dapat menciptakan manfaat bagi penyewa dan mungkin menimbulkan khawatir harus membayar sewa lebih tinggi (Zander, 2020), tanpa terlalu menguntungkan properti investor yang relatif kaya. Mencapai keseimbangan dengan kebijakan yang efektif dan adil membutuhkan pemahaman yang baik tentang hambatan yang dirasakan pemangku kepentingan dan intervensi yang diinginkan. Studi tersebut berkontribusi terhadap hal ini dengan menjelaskan perspektif investor properti melalui dua survei di seluruh Australia. Berdasarkan implikasi kebijakan, inti dari penelitian kami yaitu menunjukkan bahwa kebijakan yang berfokus terutama pada penanganan biaya awal yang tinggi (seperti yang telah digunakan secara historis) kemungkinan besar akan terjadi.

Penelitian Edmund J. Malesky (2004) menyampaikan bahwa setelah mempertimbangkan geografi, infrastruktur, dan budaya lokal, investasi asing langsung (FDI) membantu menjelaskan perbedaan tata kelola perekonomian. Secara umum, penanaman modal asing mempunyai dampak positif terhadap tata kelola. Perencanaan penanaman modal asing berbeda-beda di setiap daerah dan menimbulkan rasa frustrasi di kalangan investor. Idenya adalah untuk membuat perencanaan daerah menjadi seragam. Perubahan besar kedua adalah keputusan pemerintah pusat yang mengizinkan daerah dan kota untuk menandatangani proyek FDI secara langsung. Penelitian ini juga telah menunjukkan bahwa penanaman modal asing berkorelasi positif dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan skor indikator pembangunan manusia. Para pemimpin di tingkat daerah hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai perubahan tata kelola yang mungkin menarik bagi investor atau pilihan kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun seiring berjalannya waktu, para pejabat di tingkat daerah mulai menyadari bahwa perubahan tata kelola tertentu akan menarik investor.

Dalam ilmu politik komparatif, semakin banyak literatur mengenai federalisme yang menjaga pasar telah mengeksplorasi faktor-faktor “penarik” ini di negara-negara yang beragam seperti Amerika Serikat, Jerman, dan lain-lain. Tiongkok, Meksiko, Rusia, dan India. Gagasan dasar federalisme yang melestarikan pasar adalah bahwa persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja dan investasi antar provinsi dalam sistem desentralisasi menciptakan insentif bagi reformasi ekonomi dan peningkatan kinerja di tingkat daerah. Liburan pajak dan lahan yang lebih murah hanyalah dua cara untuk bersaing. Daerah juga menurunkan biaya transaksi dan memperbaiki lingkungan investasi. Hubungan ini saling menguatkan sehingga menyebabkan kausalitas sulit diurai. Daerah yang menarik FDI mempunyai sumber daya dan pengaruh investor terhadap tata kelola bisa beragam. Meskipun investor yang berorientasi ekspor memerlukan perbaikan dalam tata kelola untuk menurunkan biaya transaksi dan memfasilitasi daya saing produk mereka di pasar internasional, investor yang hanya tertarik untuk mengakses pasar domestik mungkin justru akan mendorong tata kelola yang lebih buram. Yang lebih penting dari FDI itu sendiri adalah interaksi FDI dengan faktor geografis dan budaya.

Muhammad Aulia Zul Thirafi (2013) menyampaikan ada 3 faktor utama yang mampu menghasilkan iklim investasi, antara lain : kondisi ekonomi makro, mencakup stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar dan stabilitas sosial dan politik. Kelembagaan, mencakup kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan dan sistem hukum. Pada sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Infrastruktur, mencakup sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Dari estimasi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang diperoleh hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur berpengaruh secara signifikan terhadap penanaman modal asing di Kabupaten Kendal, sedangkan variabel ketersediaan tenaga kerja dan kepadatan penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penanaman modal asing di Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa variabel independen yang berpengaruh terhadap penanaman modal asing di Kabupaten Kendal adalah pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang berupa ketersediaan jalan. Variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten Kendal tahun 1980 – 2010. Variabel ketersediaan tenaga kerja yang diwakilkan oleh angkatan kerja mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten Kendal tahun 1980 – 2010. Variabel infrastruktur yang diwakilkan oleh panjang jalan Kabupaten Kendal dalam ke-tergori baik, mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten Kendal tahun 1980 – 2010. Variabel kepadatan penduduk mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten Kendal tahun 1980 – 2010.

Lu Sudirman dan Wisnu Yuwono (2016) menyampaikan ketersediaan infrastruktur di suatu daerah merupakan faktor penting yang akan menentukan daya saing, pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Kondisi infrastruktur yang baik akan mendukung produktifitas perusahaan karena kegiatan perusahaan akan berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam penelitian ini penulis mengutip hasil penelitian O'Meara (2015), ketika melakukan penelitian tentang faktor penentu investasi di negara maju dan negara berkembang, menyimpulkan bahwa kebebasan ekonomi, insentif pajak (insentif fiskal) dan SDM bukanlah faktor penentu FDI, yang lebih menentukan diantaranya adalah ukuran dan skala aktivitas ekonomi di negara tujuan. Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi menjadi perhatian serius bagi calon investor mengingat salah satu keberhasilan dalam pengelolaan usaha adalah bagaimana perkembangan sumber daya manusia dapat mendukung dalam menjalankan roda perusahaan secara efisien dan efektif dengan jumlah yang memadai (Al Khatib et al, 2012; Zaenuddin, 2009; Petrovic dan Stankovic, 2009; Hartono dan Setyowati, 2009) serta dengan kualitas tenaga kerja yang baik dimana dapat dilihat dari tingkat pendidikannya (Kusumastuti, 2008). Faktor lainnya adalah tingkat upah dan hubungan industrial (Hartono dan Setyowati, 2009).

Hendra Gunawan dan kawan kawan (2020) menyampaikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Bogor menghadapi beberapa permasalahan. Pertama, Komitmen terhadap SOP dengan batas waktu penerbitan izin yang relatif tidak tepat waktu,

meskipun standar ISO terus digaungkan tetapi keluhan terhadap komitmen ketepatan waktu penyelesaian produk perizinan relatif masih banyak muncul. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Idealnya DPMPTSP memiliki staf teknis, seperti ahli penilaian amdal, kesehatan, sipil, dan transportasi. Namun, jumlah staf tersebut umumnya berada di dinas/instansi asalnya dan bukan di DPMPTSP. Ketiga, disharmoni regulasi PTSP dan ego sektoral. Berdasarkan hasil penelitian standar pelayanan ini belum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, dimana untuk waktu penyelesaian masih jauh dari harapan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat persamaan permasalahan beserta strateginya untuk meningkatkan investor. Pendapat Hammerle dan kawan-kawan (2023) tentang intervensi kebijakan dalam investasi selaras dengan pendapat Edmund J. Malesky (2004) terkait dengan tata kelola daerah. Investasi akan bergerak cepat mendatangkan investor apabila adanya tekanan kebijakan dan tata kelola daerah yang baik dengan faktor penunjang seperti insfrastruktur, sumberdaya manusia, pelayanan, hukum, perijinan dan kebebasan ekonomi serta insentif pajak yang jelas. Keterbatasan sumberdaya dan insfrastruktur serta kekuatan hukum atau intervensi terkait dengan kebijakan yang lemah membuat para investor berpikir ulang untuk melakukan investasi. Intervensi kebijakan, hukum, sumberdaya manusia serta tata kelola daerah menjadi tarik ulur untuk mendapatkan FDI di daerah.

Sepakat dengan para peneliti sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada strategi kebijakan yang telah diterapkan dan peluang strategi yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Kendal untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan investasi melalui paradiplomasi.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aulia Zul Thirafi (2013) dikemukakan bahwa bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur berpengaruh secara signifikan terhadap penanaman modal asing di Kabupaten Kendal, sedangkan variabel ketersediaan tenaga kerja dan kepadatan penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penanaman modal asing di Kabupaten Kendal. Penelitian ini diperkuat dengan Lu Sudirman dan Wisnu Yuwono (2016) yang menyampaikan bahwa kebebasan ekonomi, insentif pajak (insentif fiskal) dan SDM bukanlah faktor penentu FDI, yang lebih menentukan diantaranya adalah ukuran dan skala aktivitas ekonomi di negara tujuan.

Untuk mendukung strategi yang dicanangkan dalam RPJMD Kabupaten Kendal, Hammerle dan kawan-kawan (2023) menyampaikan bahwa untuk terciptanya keseimbangan maupun dampak investasi yang berkelanjutan perlu menciptakan manfaat bagi penyewa, tanpa terlalu menguntungkan properti investor yang relatif kaya. Pernyataan ini diperkuat Edmund J. Malesky (2004) yang menyatakan bahwa secara umum, penanaman modal asing mempunyai dampak positif terhadap tata kelola. Muhammad Aulia Zul Thirafi (2013) menyampaikan ada 3 faktor utama yang mampu menghasilkan iklim investasi, antara lain kondisi ekonomi makro, mencakup stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar dan stabilitas sosial dan politik.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, Jawa Tengah menjadi tujuan investasi tertinggi pada tahun 2018 sehingga hal ini dapat menjadi peluang bagi Kabupaten Kendal untuk mendorong investor melakukan investasi di Kabupaten Kendal. Kondisi dan stabilitas politik nasional turunnya suku bunga kredit dan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing telah dapat menarik meningkatnya nilai investasi khususnya di Kabupaten Kendal. Namun terdapat tantangan bagi Kabupaten Kendal yaitu perkembangan otonomi daerah di era globalisasi telah menjadikan masing-masing pemerintah daerah harus bersaing dalam membangun perekonomian daerah, menarik investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menangkap kondisi yang ada, maka penelitian ini akan berfokus pada bagaimana peran paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penarikan investor untuk meningkatkan investasi asing di Kabupaten Kendal. Penelitian ini akan didasarkan pada kajian kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah serta kebijakan Kabupaten Kendal guna mengetahui peluang untuk meningkatkan investasi asing di Kabupaten Kendal. Berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Kendal pada tahun 2020, perlu adanya strategi baru yang dapat menarik investor untuk melakukan investasi.

II. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta kebijakan dan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal untuk mengetahui bagaimana strategi kebijakan daerah dalam peningkatan investasi asing, peran *Foreign Direct Investment* dalam investasi Kabupaten Kendal serta bagaimana peluang dan tantangan kerjasama yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Jangkauan penelitian merupakan batasan untuk membatasi analisis dalam penelitian (Akunto, 1989). Penelitian ini memberikan batasan terhadap waktu dalam jangkauan yang bertujuan untuk menghindari melebarnya penjelasan mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Kendal dalam melakukan peningkatan investasi asing, maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini, jangkauan penelitian ini dimulai sejak tahun 2021 sampai 2022 dan berlokasi di Kabupaten Kendal.

Dalam penelitian kualitatif fenomena penelitian menjelaskan sifat fenomena, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai sesuatu yang apa adanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Fenomena penelitian berfokus pada bagaimana orang mengalami fenomena tertentu, artinya orang mengalami sesuatu bukan karena pengalaman tetapi karena fenomena yang terjadi di kehidupannya. Peneliti ingin menggambarkan secara jelas tentang objek penelitian melalui fenomena yang dialami para informan terkait. Dengan menerapkan metode kualitatif, data yang diperoleh akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, lebih luas informasinya dan lebih bermakna.

Dalam penelitian ini menggunakan data yang digunakan yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan jenis data yang disajikan dalam bentuk kata verbal yang akan membentuk teks dengan rangkaian kata, frasa, dan kalimat dan bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 1996: 2).

Dalam penelitian menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2016: 225) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk data primer didapatkan berdasarkan hasil wawancara oleh pihak terkait yang berhubungan langsung dengan investasi yang ada di Kabupaten Kendal.

Sedangkan data sekunder menurut Hasan (2002: 58) merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria yakni dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang dipilih dan dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti. Untuk keperluan penelitian ini maka informan merupakan pelaku yang terlibat secara langsung dalam kerjasama ini, maupun pihak-pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi secara tidak langsung dalam kerjasama ini.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu:

a. Dokumen

Dokumen-dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu tertulis maupun dokumen dalam bentuk gambar atau foto yang berkaitan dengan fokus penelitian, utamanya menyangkut dokumen mengenai proses investasi yang terjadi dan foto kerjasama pihak pemerintah Kabupaten Kendal dengan pihak investor. Disamping itu, teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada catatan-catatan atau arsip-arsip berupa jurnal, buku, laporan tertulis

dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti yang diperoleh dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal utamanya pada DPMPTSP Jawa Tengah dan Kabupaten Kendal, dan dalam hal ini dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kendal.

b. Observasi

Observasi akan dilakukan dengan melalui pengamatan langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data observasi ini, dilakukan untuk mengetahui kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah tentang peningkatan investasi di Kabupaten Kendal.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengutamakan teknik wawancara melalui *face to face*, dan via email lewat internet, unduh melalui situs yang berkaitan langsung dengan pemerintah daerah jika terjadi kendala dan beberapa hambatan. Hal ini dilakukan demi menjaga validitas data yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

A. Pembahasan Strategi Kabupaten Kendal Dalam Peningkatan Investasi

Melihat data BPS menunjukkan bahwa investasi di Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan. Investasi merupakan pengorbanan atas sebagian sumber daya untuk memperoleh sejumlah kompensasi atau keuntungan dimasa mendatang. Investasi tidak hanya membahas tentang keuntungan tetapi siap terjadi adanya kerugian yang dialami. Investasi disebut juga sebagai penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif (Sutha, 2000). Investasi adalah penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah (Webster, 1999).

Menurut Lypsey (1997), investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Unit yang diinvestasikan mencakup waktu yang digunakan, tingkat inflasi yang diharapkan dan ketidakpastian masa mendatang. Investasi merupakan penanaman modal di dalam perusahaan, dengan tujuan agar kekayaan suatu korporasi atau perusahaan bertambah. Investasi juga didefinisikan sebagai barang-barang yang dibeli oleh individu ataupun perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka (Mankiw, 2000).

Pengertian investasi asing didefinisikan sebagai modal yang disediakan oleh penduduk dari suatu negara kepada penduduk negara lain (Griffin & Pustay, 2015, 8). Investasi asing dapat memasuki suatu negara dikategorikan menjadi dua: investasi asing langsung dan investasi portofolio asing. Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment- FDI*) merupakan jenis investasi dengan tujuan secara aktif mengendalikan properti, asset, atau perusahaan yang berlokasi di negara tuan rumah (*host country*). Perusahaan yang terlibat dalam FDI dan memiliki atau mengendalikan aktifitas penambahan nilai suatu negara atau lebih yang dikenal dengan korporasi multinasional (*Multinational Corporation-MNC*). Selain memiliki dan mengendalikan aset asing, MNC biasanya membeli sumber daya di berbagai negara, menciptakan barang atau jasa di berbagai negara, kemudian menjual barang dan jasa tersebut di berbagai negara. Investasi langsung dapat berupa:

- pembentukan suatu cabang perusahaan di negara pengimpor modal;
- pembentukan suatu perusahaan dimana perusahaan dari negara penanam modal memiliki mayoritas saham; pembentukan suatu perusahaan di negara pengimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan terletak di negara penanam modal;

- mendirikan suatu korporasi di negara penanam modal untuk secara khusus beroperasi di negara lain; atau menaruh asset (aktif) tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanam modal (Jhigan, 2014, 483).

Faktor-faktor yang mempengaruhi FDI mengingat kompleksitas ekonomi global dan beragamnya kesempatan yang dihadapi perusahaan di negara-negara yang berbeda, tidaklah mengejutkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan FDI. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai faktor pasokan, permintaan, dan faktor politik (Griffin & Pustay, 2015, 165).

A. Faktor Pasokan

Keputusan perusahaan untuk melakukan FDI dapat dipengaruhi pasokan, meliputi:

1. Biaya Produksi

Perusahaan sering kali melakukan FDI untuk menurunkan biaya produksi. Lokasi asing mungkin lebih menarik dibandingkan lokasi domestik karena lebih rendahnya harga tanah, tarif pajak, sewa real estat komersial, atau karena ketersediaan yang lebih baik dan lebih rendahnya biaya tenaga kerja terampil atau tidak terampil.

2. Logistik

Jika biaya transportasinya signifikan, sebuah perusahaan mungkin akan memilih untuk memproduksi di pasar asing daripada mengekspor dari pabrik domestik.

3. Ketersediaan Sumber Daya Alam

Perusahaan dapat menggunakan FDI untuk mengakses sumber daya alam yang penting bagi operasi mereka.

4. Akses Terhadap Teknologi

Motif lainnya untuk melakukan FDI adalah untuk mendapatkan akses terhadap teknologi. Perusahaan dapat merasa lebih menguntungkan untuk mendapatkan saham kepemilikan dalam perusahaan yang telah ada daripada untuk membentuk kelompok ilmuwan riset dalam perusahaan untuk mengembangkan atau menghasilkan kembali sebuah teknologi baru.

B. Faktor permintaan

Perusahaan juga dapat melakukan FDI untuk mengembangkan pasar produk mereka. Faktor permintaan yang mendorong FDI meliputi akses pelanggan, menghasilkan beberapa jenis keunggulan pemasaran, eksploitasi keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan dan mobilitas pelanggan.

C. Faktor politik

Faktor politik juga dapat masuk ke dalam keputusan untuk ambil bagian FDI. Perusahaan mungkin saja berinvestasi di sebuah negara asing untuk menghindari rintangan perdagangan dari negara tuan rumah atau untuk memanfaatkan pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh pemerintah tuan rumah.

Menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 1998) terdapat tiga alasan untuk melakukan investasi antara lain yaitu:

- Resource seeking*: investasi dilakukan untuk mencari faktor-faktor produksi yang lebih efisien di negara lain dibandingkan dengan menggunakan faktor produksi di dalam negeri yang lebih mahal.

- b. *Market seeking*: investasi yang dilakukan dengan tujuan mencari pasar yang baru atau mempertahankan pasar yang lama. Strategi ini dapat juga dilakukan sebagai strategi pertahanan. Investasi dengan latar belakang untuk mencari pasar direalisasikan di dalam bentuk merger dan akuisisi.
- c. *Efficiency seeking*: investasi dimana perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensinya dengan mengambil keuntungan dari *economic scale* dan *scope*. Tipe FDI ini banyak digunakan di negara-negara berkembang.

Mengutip dari media massa milik Kabupaten Kendal, [Bupati Kendal yaitu Dico M Ganinduto](#) telah melakukan beberapa hal yang memberikan gebrakan besar bagi pembangunan Kabupaten Kendal. Gebrakan ini bertujuan untuk meningkatkan investasi baik asing maupun lokal diantaranya:

1. Pertemuan dengan beberapa menteri dalam rangka memperkuat koneksi pusat-daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan Dico Ganinduto untuk mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Kendal adalah dengan memperkuat hubungan antara pusat dan daerah. Bupati Dico giat melakukan dialog dan diskusi dengan para menteri agar Kabupaten Kendal menjadi perhatian pemerintah pusat ke depannya.

2. Pengembangan *Smart City*

Pengembangan *Smart City* dan digitalisasi UMKM dengan melakukan penandatanganan MoU kerjasama tanggal 22 maret dengan digital platform seperti gojek, grab dan Tokopedia untuk dapat memberikan pendampingan UMKM agar mampu go digital.

3. Penandatanganan MoU

Penandatanganan MoU dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ([LPEI](#)) dalam rangka memberikan pendampingan pelatihan ekspor guna mengembangkan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM), koperasi, serta UMKM melalui program tematik ekspor pada 25 Maret 2021.

Dari tiga langkah yang dilakukan oleh Bupati, dapat terlihat bahwa Kabupaten Kendal merupakan daerah yang stabil terkait dengan faktor politik. Hubungan yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang dapat menarik investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Kendal.

Kemudian pengembangan teknologi yang ada di Kabupaten Kendal juga menjadi strategi yang dilakukan pemerintah untuk mendorong berkembangnya UMKM yang dapat menarik investor untuk mengembangkannya. Keberadaan *Smart City* menurut Setiyono (2020) tidak dapat dipungkiri dapat memberikan manfaat diantaranya:

- a. Mengurangi beban kinerja birokrasi
- b. Mengurangi biaya pelayanan publik
- c. Menyediakan pelayanan non-stop
- d. Mengektifkan komunikasi vertikal dan horizontal

Menelaah manfaat yang ada para investor dapat memutuskan untuk melakukan investasi di Kabupaten Kendal yang dibuktikan dengan adanya MoU dan pembangunan pabrik di Kawasan Industri Kendal maupun kawasan lainnya di Kendal. Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Naya mengunjungi Kawasan Industri Kendal, Jumat 11 Maret 2022. Usai meninjau kantor KIK Kendal, kemudian rombongan Dubes Singapura bersama Bupati kemudian melanjutkan peninjauan di PT. Eclat

Textile International yang bergerak dibidang fashion dan Sport, dan PT. Kendal Eco Furindo yang bergerak dibidang Furniture (Kendal, 2022).

Untuk menarik investasi asing perlu menggali proses tarik menarik yang dikenal dengan *Push-Pull Mooring* untuk menjelaskan masalah perilaku *switching*. Penggunaan kerangka kerja PPM sangat relevan untuk memberikan wawasan mendalam dan menjelaskan masalah perilaku peralihan dalam model teoretis. Semua faktor yang digunakan dalam teori ini akan dikategorikan berdasarkan kerangka PPM, yaitu faktor pendorong, penarik, dan mooring. Menurut teori PPM, aksi tarik dan dorong berinteraksi untuk menghasilkan gerakan baru, yang dihambat oleh aksi tambatan (Chang et al., 2017).

Faktor pendorong dipandang sebagai konstruksi yang merugikan dari metode lama yang menggoda orang untuk beralih ke metode lainnya. Sebaliknya, faktor penarik adalah elemen memikat yang menarik orang ke metode baru. *Mooring effect* dihasilkan dari faktor internal atau eksternal yang berkaitan dengan individu yang mampu memfasilitasi proses pergerakan (Handarkho & Harjoseputro, 2019). Seiring berjalannya waktu, teori PPM tidak hanya dikaitkan dengan analogi migrasi dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi juga dikaitkan dengan perilaku berpindah (Handarkho & Harjoseputro, 2019). Dalam konteks *e-commerce*, teori PPM banyak diterapkan pada masalah perilaku peralihan konsumen dari metode *incumbent* ke alternatif baru yang menguntungkan (Handarkho & Harjoseputro, 2019; Sun et al., 2017).

Push factor didefinisikan sebagai komponen signifikan yang mendorong orang untuk mengubah perilaku konsumen dari belanja *offline* menjadi belanja *online* dengan memasukkan teknologi *Augmented Reality* (AR). Ketidakpuasan adalah masalah utama yang masih relevan untuk mendorong konsumen meninggalkan cara lama. Ketidakpuasan dengan metode sebelumnya menjadi elemen pendorong dalam mengubah metode pembelian, mendorong pelanggan untuk pindah. Dengan ketidaknyamanan seperti waktu, jarak, atau proses yang sulit, konsumen menjadi tidak puas dengan kualitas pendekatan saat ini, membuat mereka mencari alternatif (Fu et al., 2021; Zeng et al., 2021). Faktor penarik dengan melibatkan penggunaan media, keinformatifan yang dirasakan, dan kenikmatan yang dirasakan menjadi faktor perpindahan yang dirasakan.

Pull factor disesuaikan dengan faktor utilitas teknologi AR. Pengguna potensial teknologi AR diduga menjanjikan kegunaan, kesenangan, dan nilai informasi (Zeng et al., 2021). Ketika konsumen merasakan kegunaan media dari teknologi terbaru dan teknologi tersebut membawa informasi dan kesenangan yang dirasakan, maka kesediaan pengguna untuk menggunakan teknologi baru dan menerimanya sebagai metode pembelian baru mereka akan meningkat (Kowalczyk et al., 2021).

Faktor *Mooring* (komitmen afektif dan kewananan yang dirasakan). Faktor ini berkaitan dengan hal-hal yang mendorong atau memudahkan pengambilan keputusan untuk urusan diri sendiri, kelompok, atau lingkungan. Faktor ini merupakan faktor selain faktor pendorong dan penarik yang berdampak pada keputusan konsumen untuk mengubah perilakunya. Misalnya, faktor yang berasal dari faktor komitmen afektif konsumen, seperti ikatan emosional dengan produk atau rasa keakraban yang kuat (Sun et al., 2017). Dalam nada yang sama, penilaian tentang perubahan perilaku dapat dipengaruhi oleh bagaimana kewananan dianggap. Orang tua, kerabat, atau teman pelanggan dapat mendorong mereka untuk mengadopsi teknologi baru (Handarkho dan Harjoseputro, 2019).

B. Strategi Paradiplomasi

Diplomasi menurut Sir Ernest (2011: 1) dalam buku yang berjudul *Guide to Diplomatic Practice* memiliki definisi bahwa diplomasi merupakan penggunaan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antar pemerintah negara dengan negara yang dilakukan dengan cara damai.

Diplomasi merupakan praktek untuk membuat pemerintahan bisa memperbaiki atau memulai kerjasama yang dapat menguntungkan bagi kedua negara maupun lebih (Setiawan, 2016). Saat ini negara tidak akan berkembang apabila tidak menjalin hubungan diplomasi seperti kerjasama dengan negara lain. Untuk mencapai kepentingan nasional, maka perwakilan negara harus terlibat dalam kerjasama internasional

untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan untuk kepentingan nasional. Terjalannya diplomasi dapat diimplementasikan dengan adanya kerjasama perekonomian, pendidikan, maupun kebudayaan (Mukti, 2013).

Hubungan yang ada antar negara yang terjalin guna menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *lobby*, kunjungan, dan aktivitas - aktivitas lainnya yang terkait melalui perwakilan masing-masing negara (Morgenthau, 1991: 296).

Dengan berkembangnya kerjasama internasional, aktor sub-nasional seperti pemerintah daerah dapat menjalin hubungan diplomasi melalui paradiplomasi. Hubungan ini memiliki tujuan untuk membangun daerahnya namun tetap sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 dalam Bab III. Dalam menjalankan paradiplomasi terdapat persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi dan telah diatur dalam dasar hukum kerjasama internasional dalam Undang-Undang No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Paradiplomasi menurut Barros (2010: 47) merupakan alat penting untuk menegaskan sebuah proyek nasional dalam pengembangan pembangunan yang lebih besar dan otonomi lebih besar bagi daerah. Pemerintah daerah dalam menjalin kerjasama internasional tetap sesuai dengan aturan pemerintah pusat dan hukum nasional yang berlaku.

Menurut Lecours (2008: 2-3) praktek paradiplomasi telah lama berkembang di negara-negara maju yang dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok yaitu:

- a. hubungan dan kerjasama pemerintah regional atau '*sub-states*'. Dimana hubungan ini hanya berorientasi pada tujuan-tujuan ekonomi seperti perluasan pasar, pengembangan investasi ke luar negeri, dan investasi secara timbal balik.
- b. paradiplomasi yang melibatkan berbagai bidang dalam kerjasama atau '*multipurposes*', antara ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan alih teknologi, dan sebagainya.
- c. paradiplomasi kompleks yang melibatkan motif-motif politik dan identitas nasionalis wilayah yang spesifik.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2020 telah diatur bentuk kegiatan paradiplomasi atau kerjasama daerah dengan luar negeri yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan pembentukan *sister province*, *sister city*, *foreign direct investment*, pembentukan proyek bersama serta pengiriman delegasi. Pemerintah daerah memiliki peluang yuridis untuk melakukan paradiplomasi yang harus didasarkan pada kepentingan daerah yang fundamental, dan bukan sebuah peluang untuk merencanakan pejalan ke luar negeri bagi para pejabat daerah secara legal dengan menggunakan anggaran daerah (Mukti, 2013).

Lawatan Bupati Kendal ke Hongkong membuktikan bahwa strategi paradiplomasi telah berhasil membawa investor masuk ke daerah. Mengutip dari Haluanjateng.com (2022), Bupati [Kendal](#), [Dico M. Ganinduto](#) melakukan kunjungan kerja ke [Hongkong](#) mendapatkan komitmen [investasi](#) sebesar Rp700 miliar. Investasi yang didapat dari Hongkong itu diberikan untuk rencana pembangunan fasilitas pengolahan daur ulang sampah plastik di atas tanah seluas 2,5 hektar. Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah Kendal, Sugiono melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Mou dengan PT. Alba Tridi Plastics Recycling Indonesia. Selain untuk menjaga hubungan baik dan komunikasi bilateral mampu menarik investasi bagi pemerintah Kendal. Investasi yang didapat dari investor Hongkong akan memberikan tiga nilai tambah untuk masyarakat Kendal. Pertama, bagi sisi ekonomi mampu memberdayakan warga dan memberikan pendapatan desa melalui usaha pengelolaan sampah plastik. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat Kendal terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Ketiga, dengan pengelolaan sampah meningkatkan sumber daya manusia dengan pelatihan dan

menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, investasi sebesar Rp700 miliar ini untuk fasilitas daur ulang plastik ini akan mendaur ulang sampah sekitar wilayah Kabupaten Kendal dan sekitarnya.

Dari kunjungan yang dilakukan Bupati Kendal, membuktikan bahwa otonomi daerah memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan daerah. Salah satu perkembangan daerah yaitu pemerintah daerah dapat menjadi aktor utama dalam diplomasi. Kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 dalam Bab III yang mana kunjungan keluar negeri atau paradiplomasi ini membawa manfaat untuk daerah.

Mengutip data dari peta investasi Kabuapten Kendal tahun 2023 terdapat penanaman modal asing dengan rincian:

Triwulan	Total Investasi
1	Rp. 280.814.761.046,00
2	Rp. 1.213.592.916.737,00
3	Rp. 1.410.956.476.548,00
4	Rp. 1.914.319.890.975,00
Total	Rp. 4.819.684.045.306,00

Source: https://peta.kendalkab.go.id/profile/realisasi_investasi?tahun=2023 diakses pada 3 Februari 2024.

Dalam media massa Jatengmemanggil.com (2023) disebutkan juga bahwa Bupati Kendal Ingin memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Bupati Kendal, Dico M. Ganinduto, melakukan kunjungan kerja ke negara Singapura, untuk membahas lebih lanjut terkait kolaborasi kerjasama serta investasi diberbagai sektor di Kabupaten Kendal bersama Singapura. Menurut Dico, Jaspal Sidha memiliki passion yang sangat dalam terhadap kemajuan pendidikan, sehingga pihaknya memutuskan dan sepakat untuk berkolaborasi dengan *Singapore International Scholl* (SIS) dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan SIS. Lebih lanjut Bupati Kendal menyampaikan, hasil dari kunjungannya di Singapura tersebut diantaranya yaitu para guru di Kabupaten Kendal diberi kesempatan untuk mendapat pelatihan oleh SIS di Indonesia. Dico melanjutkan, Dalam hal itu, ada kabar yang lebih bagus lagi, bahwa Jaspal Sidha akan berinvestasi membangun Singapore Internasional School di Kendal untuk meningkatkan pendidikan. Bupati juga menyempatkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri dan para Menteri Singapura, membahas terkait dengan rencana pengembangan industri, tata perkotaan, dan juga rencana pembangunan pelabuhan Kendal.

“PSA juga akan berinvestasi di Kendal yakni dalam pembangunan Pelabuhan Kendal. Untuk mendukung ekosistem industri, hal seperti ini sangat diperlukan,” tandasnya. Bupati Kendal, Dico M. Ganinduto, melakukan kunjungan kerja ke Negara Singapura dalam rangka membahas kolaborasi kerjasama serta investasi diberbagai sektor di Kabupaten Kendal bersama Singapura.

Dalam penelitian ini, konsep Paradiplomasi yang dikemukakan oleh Barros (2010: 47) yang telah sesuai dengan penelitian ini. Paradiplomasi merupakan alat penting untuk menegaskan sebuah proyek nasional dalam pengembangan pembangunan yang lebih besar dan otonomi lebih besar bagi daerahnya. Paradiplomasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai kepentingan yang ada. Sehingga dalam menjalankan paradiplomasi perlu melihat tentang kekuatan dari dasar hukum yang mengikat perjanjian kerjasama dalam skema paradiplomasi.

III. Penutup

Investasi disebut sebagai penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif. Dalam investasi terbagi menjadi dua yaitu lokal dan asing. Investasi asing didefinisikan sebagai modal yang disediakan oleh penduduk dari suatu negara kepada penduduk negara lain. Investasi asing dapat memasuki suatu negara dikategorikan menjadi dua: investasi asing langsung dan investasi portofolio asing. Investasi mengalami aksi tarik dan dorong berinteraksi untuk menghasilkan gerakan baru, yang dihambat oleh aksi tambatan. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya dikaitkan dengan analogi migrasi dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi juga dikaitkan dengan perilaku berpindah. Untuk menarik investasi asing perlu menggali proses tarik menarik yang dikenal dengan *Push-Pull Mooring* untuk menjelaskan masalah perilaku *switching*. Penggunaan kerangka kerja PPM sangat relevan untuk memberikan wawasan mendalam dan menjelaskan masalah perilaku peralihan dalam model teoretis. Semua faktor yang digunakan dalam teori ini akan dikategorikan berdasarkan kerangka PPM, yaitu faktor pendorong, penarik, dan mooring. Untuk dapat membantu PPM, perlu adanya pendekatan paradiplomasi daerah ke luar negeri. Pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam paradiplomasi diharapkan lebih aktif untuk melakukan kunjungan dan mempromosikan potensi wilayahnya di luar negeri untuk menarik investor. Kunjungan yang mengundang investasi memiliki manfaat untuk pengembangan kesejahteraan daerah. Dengan hal ini maka paradiplomasi perlu dikembangkan dan menjadi salah satu strategi peningkatan investasi di daerah. Penelitian ini dapat dibuat rekomendasi berupa *policy brief* untuk dapat meningkatkan peran paradiplomasi di daerah.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. (2005). Analisis Investasi, Edisi 2. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Adielyani, D. & Mawardi, W. (2020). *The Influence of Overconfidence, Herding Behavior, and Risk Tolerance on Stock Investment Decisions: The Empirical Study of Millennial Investors in Semarang City*. *Makhsipreneur*, 10(1), 89- 101.
- Aditya Nugroho, Wei-Tsong Wang. (2023). *Consumer switching behavior to an augmented reality (AR) beauty product application: Push-pull mooring theory framework*. *Computers in Human Behavior* Volume 142. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107646>.
- Aimee Dawis, Ph.D. (2010). "How Does The ASEAN-China Free Trade Agreement Prepare Indonesia to Become A Global Economic Player?". Jakarta: The Indonesian Quarterly Third Edition 2010 Vol. 38 No. 3, CSIS.
- Barros, M. A. (2010). *Outlooks for the legal framing of Paradiplomacy: The case of Brazil*. Federal Governance.
- Kartasasmita, G. (1997). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pemnagunan yang Berakar pada Masyarakat*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Lai, Jung-Yu & Debbarma, Sutapa & Ulhas, Khire. (2012). *An empirical study of consumer switching behaviour towards mobile shopping: A Push-Pull-Mooring model*. *International Journal of Mobile Communications*. 10. 386-404. 10.1504/IJMC.2012.048137.
- Lecours, A. (2008). 'Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World'. Netherlands Institute of International Relations: Clingendael.
- Luong, L.P. and Thu Ha, D.T. (2011). *Behavioral Factors Influencing Individual Investors' Decision-Making and Performance. A Survey at the Ho Chi Minh Stock Exchange*. Unpublished M.Sc. Thesis, Umea School of Business.
- Mara Hammerle, Lee V. White, Bjorn Sturmberg. (2023). *Solar for renters: Investigating investor perspectives of barriers and policies*. *Energy Policy* Volume 174. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113417>.
- Muhadi, S. (2006). *Global Governance Sebagai Agenda Penelitian Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta.

- Mukti, T. A. (2015). *Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional Paradiplomacy: The Rise of Local Actor in International Fora*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Pascal Kowalczyk, Carolin Siepmann (née Scheiben), Jost Adler, Cognitive. (2021). *Affective, and behavioral consumer responses to augmented reality in e-commerce: A comparative study*. Journal of Business Research Volume 124. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.10.050>.
- Stefan, W. (2009). *Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*. Nottingham: University of Nottingham.
- Zelinsky, W. (1991). The Twinning of the World: Sister Cities in Geographic and Historical Perspective. *Annals of the Association of American Geographers*, 81(1), 1–31. <http://www.jstor.org/stable/2563668>